

VISI DAN AGENDA BERSAMA KOTA BAU-BAU

Visi Kota Bau-Bau

Pemerintah menjamin penegakan supremasi hukum, di mana penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya dan melindungi masyarakat, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban, tidak ada lagi kasus korupsi di kota Bau-Bau. Warga diikutsertakan dalam mendorong dan memantau penyelenggaraan hukum.

Pemerintah menjamin semua warga menikmati pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) memprogramkan dalam restranya untuk pendidikan yang terjangkau dan berkualitas mulai dari tingkat SD sampai SLTA. Pemerintah memfasilitasi agar lembaga pendidikan didukung dengan teknologi. Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi proses pendidikan dan anggaran yang dialokasikan. Pemerintah memperbanyak perpustakaan, termasuk perpustakaan keliling, sehingga anak-anak dan warga lainnya dapat mengakses dan menikmati informasi yang terdapat di dalamnya. Pihak sekolah dan guru mendorong terciptanya kondisi yang memacu anak-anak murid menjadi gemar membaca dan belajar.

Pemerintah memfasilitasi berdirinya lembaga independen sebagai tempat/wadah untuk menyalurkan pengaduan masyarakat, atau siapa pun (baik pemerintah, swasta maupun masyarakat) terkait dengan mekanisme pelayanan publik.

Warga kota sudah mempunyai dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi, warga bisa mengakses fasilitas internet yang difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah mendorong Penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung pertanian dan perikanan

Pemerintah dan masyarakat kota Bau-Bau mengembangkan kota secara lebih harmonis dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menciptakan keseimbangan alam sehingga ketersediaan air di Bau-Bau tetap lestari.

Warga tetap memelihara nilai-nilai kearifan lokal (contoh: *kande-kandea*) secara turun-temurun. Pemerintah memiliki keberpihakan terhadap terpeliharanya budaya yang hidup di masyarakat, dan melindungi budaya lokal dari intervensi budaya luar sehingga masyarakat Bau-Bau tetap beradab dan berakhlakul Qarimah. Pemerintah memfasilitasi penulisan dan penerbitan buku-buku yang memuat sejarah kota, dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga masyarakat dan pegiat seni budaya dapat melakukan pagelaran seni budaya secara rutin agar dapat diturunkan kepada generasi muda.

Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan munculnya pemimpin perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dalam bidang pemerintahan, bidang sosial dan kemasyarakatan. Pemerintah & masyarakat punya apresiasi yang sama untuk sensitif gender. Pemerintah memfasilitasi upaya-upaya agar jumlah perempuan yang buta huruf semakin berkurang. Pemerintah juga memberikan dorongan dan menciptakan

kondisi yang kondusif untuk terbentuknya kelompok ekonomi usaha perempuan, seperti koperasi perempuan di tingkat desa/kelurahan.

UKM mendapatkan perlindungan dari pemerintah sehingga mampu bertahan, berkembang dan mampu memposisikan diri dalam sistem perekonomian global. Pemerintah menyediakan infrastruktur perkoperasian sebagai sarana masyarakat untuk meminjam modal usaha untuk pengembangan ekonomi, termasuk industri rumah tangga tenun. Pemerintah melakukan upaya promosi terhadap hasil usaha kecil menengah dan industri rumah tangga lainnya agar hasilnya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.

Pemerintah mengangkat industri lokal sehingga bisa bersaing di dunia internasional (contoh: gerabah, dll), dan mendorong terjalinnya kemitraan antara pengusaha – perbankan – pemerintah daerah. Pemerintah dan masyarakat (nelayan dan petani) melakukan perbaikan jembatan dan pelabuhan untuk menciptakan Kota Bau-Bau sebagai pemasok ikan terbesar sekaligus sentra produksi pertanian, misalnya sayuran.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Pemerintah memenuhi hak-hak semua warga khususnya masyarakat miskin, perempuan, rentan dan marginal (penyandang cacat, yatim piatu) yang berada di wilayah pesisir dan *pedesaan (sekitar hutan)* dan memperhatikan suara-suara dari bawah/ warga dalam proses pembangunan.

DPRD konsekwen menjalankan fungsinya dengan baik (legislasi, budgeting dan kontrol). Politisi di kota bau-bau sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat, merakyat dan berpihak pada masyarakat bawah. Pemerintah kota Bau-Bau lebih dekat dengan rakyat dan memperhatikan aspirasi masyarakat bawah. Pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

OMS mampu memerankan diri sebagai pendamping masyarakat terutama masyarakat miskin dan kelompok yang selama ini seringkali terpinggirkan dalam proses pembangunan. OMS mempraktekkan dan mempromosikan aspek-aspek Tata Kepemerintahan Lokal Demokratik dalam organisasinya.

Pemerintah melakukan upaya-upaya agar kesehatan ibu dan anak lebih terjamin dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak. Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan gratis (melalui program Jamkesmas), yang memenuhi standar pelayanan publik. Pemerintah menyediakan tenaga medis yang profesional.

AGENDA KOTA BAU-BAU

1. PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota OMS Eksekutif Legislatif Media	<ul style="list-style-type: none">• Meyediakan informasi mengenai produk-produk hukum dan perundang-undangan yang mudah diakses.• Memfasilitasi kelompok-kelompok sadar hukum• Menyusun aturan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pendampingan hukum bagi masyarakat miskin melalui APBD• Membentuk lembaga pelayanan informasi publik tentang hukum dan perundang-undangan

2. Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Dinas Diknas Dewan Pendidikan Komite Sekolah Orang Tua Siswa Guru	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan melaksanakan program pendidikan gratis hingga SLTA• Aktif memberikan masukan kepada pemerintah sekaligus mengawasi penyelenggaraan pendidikan• Terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan di tingkat sekolah• Menyusun perencanaan dan membuat skema peningkatan kemampuan guru dan murid dalam bidang IT

3. Mekanisme kontrol terhadap layanan publik

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah Kota OMS Warga Akademisi Media	<ul style="list-style-type: none"> • Menirikan lembaga independen sebagai tempat pengaduan masyarakat yang terkait dengan mekanisme pelayanan publik • Membuat regulasi tentang penerapan standar pelayanan minimum serta menyediakan anggaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. • Memberikan penghargaan kepada SKPD yang memberikan pelayanan yang baik dan memberikan hukuman kepada SKPD yang memberikan layanan kurang baik.

4. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi yang terjangkau dan pengembangan teknologi tepat guna

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota Telkom Pengusaha IT Masyarakat OMS Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi bagi pelayanan publik di kota ini. • Menyediakan fasilitas Hot Spot di titik-titik strategis di kota Bau-Bau • Mendorong terjalinnya kerjasama dengan pihak pengusaha IT. • Melakukan penelitian terhadap teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. • Mendorong adanya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna.

5. Pengembangan kota yang mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota Swasta Masayarakat Stake holders DPRD (yang bergabung dalam Tim Kerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap aset-aset SDA dan kondisi geografis kota Bau-Bau 2. Menyediakan informasi yang mudah diakses terkait dengan pengembangan tata ruang kota 3. Mendorong lahirnya peraturan-peraturan yang partisipatif, transparan dan akuntabel mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan, tanah dan air yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

6. Pelestarian dan pengembangan seni budaya

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota Budayawan Tokoh adat OMS Seniman Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan penganggaran untuk penelitian dan penulisan sejarah kota dan pengembangan kreasi seni budaya lokal • Identifikasi asset-aset budaya, benda-benda bersejarah, adat istiadat dan sebagainya • Menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai kegiatan seni dan budaya serta obyek-obyek wisata • Mendorong revitalisasi lembaga-lembaga adat sebagai wadah untuk menjaga pelestarian seni dan budaya.

7. Kesetaraan hak, kewajiban dan peluang laki-laki dan perempuan disemua bidang kehidupan

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota Kelompok perempuan Kelompok Peduli perempuan BPM Kota DPRD LSM Program / Donor (P2KP)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan aturan tentang pelibatan warga, dengan menitik beratkan pada pelibatan orang miskin, perempuan dan kelompok termarginalkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. • Melakukan penguatan kapasitas kepada warga (kelompok perempuan, kelompok peduli) dalam proses-proses pengambilan kebijakan • Mengorganisir warga dalam sebuah wadah untuk menyuarakan aspirasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan.

8. Usaha Kecil Menengah (UKM)

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Kelompok UKM LSM Disperindagkop Dis Koperasi & UKM Kadin BPM DPRD Program/Donor	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan kebijakan khusus bagi pelaku UKM dalam memudahkan mereka mengakses modal di lembaga-lembaga keuangan. • Menyediakan peluang bagi peningkatan kapasitas bagi pelaku UKM • Menyediakan layanan informasi yang mudah diakses mengenai berbagai hal seperti: harga dan komoditas unggulan, peluang peningkatan kapasitas, permodalan dll. • Mendorong efektifitas sumber-sumber

		permodalan yang tersedia contoh: perbankan dan program-program SKPD
--	--	---

9. Peningkatan partisipasi aktif warga dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	DPRD Pemerintah kota OMS Program/Donor	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pendidikan politik kepada warga • Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan warga. • Mengeluarkan kebijakan tentang jaminan pemenuhan hak-hak dasar warga • Melibatkan OMS dalam penyusunan Draft kebijakan tentang pemenuhan hak-hak dasar warga

10. DPRD dan PemKot mampu bekerja & menjalankan fungsinya secara transparan, akuntabel dan kompeten

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota OMS (LSM, organisasi warga) DPRD Program/donor	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh warga mengenai berbagai kebijakan pembangunan • Menyediakan peluang bagi warga untuk terlibat dalam menyusun aturan/perda • Menyediakan ruang dan peluang bagi warga untuk memberikan saran dan kritik terhadap proses pembangunan.

11. Peningkatan peran dan fungsi OMS

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	OMS Pemerintah Kota Program / Donor	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan anggaran untuk program-program peningkatan kapasitas bagi warga. • Aturan yang memberikan peluang kepada warga untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. • OMS terlibat dalam tim perumus draft Perda yang dibuat oleh pemerintah • Membentuk jaringan untuk mensinergikan kekuatan, dengan membuat forum OMS.

12. Pelayanan kesehatan bagi warga yang terjangkau dan berkualitas

No.	SIAPA AKTOR YANG TERLIBAT	APA/BAGAIMANA MELAKUKAN
	Pemerintah kota Rumah Sakit Tempat-tempat pelayanan kesehatan Kelompok warga LSM Media	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah menyediakan tenaga medis yang professional dibidangnya• Menyusun dan mensosialisasikan SPM disetiap unit yang melayani kesehatan masyarakat (Puskesmas, RSUD, dll)• Ada peningkatan kualitas pelayanan yang terjangkau melalui pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas/ Posyandu)• Masyarakat mengawasi, mengontrol dalam segala pelaksanaan kegiatan• Membuka ruang public/ kritik, saran dan pengaduan sebagai transparansi pelayanan